



SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
TAHUN 2019

DINAS P S D A
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KATA PENGANTAR

AssalamualaikumWrWb,

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Rencana Tindak Pengendalian Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dapat diselesaikan.

SPIP berguna dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dibidang keuangan negara sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan untuk menciptakan **good governance** sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan negara yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan negara/daerah.

Akhirnya kami berharap semoga SPIP periode Tahun 2019 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Dinas PSDA Kabupaten Pesisir Selatan dan umumnya untuk Kabupaten Pesisir Selatan.

Wassalamu'alaikumwr,wb.

Painan, April 2019

KEPALA DINAS

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KABUPATEN PESISIR SELATAN



Ir. Doni Gusrizal, M.M.

NIP. 19641106 199703 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Ruang Lingkup	2
 BAB II SEKILAS TENTANG SPIP	
A. Pengertian	3
B. Tujuan SPIP	3
C. Unsur-unsur SPIP	4
1. Lingkungan Pengendalian	4
2. Penilaian Resiko	5
3. Aktivitas Pengendalian	5
4. Informasi dan Komunikasi	5
5. Pemantauan Berkelanjutan	6
D. Pernyataan Tanggung Jawab (<i>Statement of Responsibilities</i>)	6
 BAB III PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN	
A. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang baik	8
B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini	8
C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian	10

BAB IV RESIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

A. Pernyataan Tujuan	13
B. Resiko-resiko	13
C. Pengendalian Terpasang	15
D. Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan	16

BAB V INFORMASI DAN KOMUNIKASI 17**BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI** 19

1. Pemantauan Berkelanjutan	19
2. Evaluasi Terpisah	20
3. Pelaksanaan Tindak Lanjut	20
4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP	20

BAB VI PENUTUP

Lampiran

21

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dibidang keuangan negara sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan untuk menciptakan **good governance** sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan negara yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai padoman dalam pengelolaan keuangan negara/daerah.

SPIP diartikan sebagai proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu :

1. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan
2. Keandalan pelaporan keuangan
3. Pengamanan asset Negara
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

II. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan SPIP pada Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/58/Kpts/BPT-PS/2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.

III. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada serta mengkomunikasikan dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan.

IV. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkat manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam tahun 2019

BAB II

SEKILAS TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

A. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Menurut Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan, sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

SPI dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/daerah yang diamanatkan kepada Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

C. Unsur – unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu atmosfer yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern dilingkungan Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan. Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang sangat penting karena pemimpin berperan sebagai *tone at the top* (penentu "irama" organisasi), perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan.

3. Aktivitas Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pada pengendalian dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu **prevention and mitigation**. Pengendalian yang bersifat **prevention** merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat **mitigation** merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, untuk memperoleh informasi yang berguna mengumpulkan dan mengolah data sehingga

menjadi informasi dari data-data tersebut informasi yang diharapkan lebih terarah dan penting karena telah dilalui berbagai tahap dalam pengolahannya. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

5. Pemantauan Berkelanjutan.

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya dapat ditindaklanjuti. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Wali Kota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan

secara memadai. Untuk meyakini kehandalan sistem pengendalian intern yang ada, Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauhmana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukan sejauhmana pengendalian telah dijalankan.

 pdfelement

BAB III

PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Tujuan Terciptanya Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan pondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif dilingkungan Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
5. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif;
dan
6. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan mengambil langkah strategis yaitu:

1. Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh lingkup Dinas PSDA Kab.

Pesisir Selatan; Seluruh lingkup Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan (3 Kabid dan 1 Sekretariat) telah melaksanakan survey persepsi melalui kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) yang tertuang dalam RTP masing-masing. Oleh karena itu, Satgas perlu melakukan Rekapitulasi pernyataan-pernyataan Lingkungan Pengendalian seluruh Irban dan sekretariat pada Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan.

2. Melakukan Skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1: Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian

No	Skor	Keterangan
1.	1	Tidak Memadai
2.	2	Kurang Memadai
3.	3	Cukup Memadai
4.	4	Memadai

3. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian pada Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan, diperoleh gambaran yang tertuang pada table dibawah ini:

Tabel 2:Penilaian terhadap lingkungan Pengendalian

No.	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Kurang Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Cukup Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai

4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Cukup Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	Cukup Memadai
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Cukup Memadai
7.	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Cukup Memadai
8.	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Cukup Memadai

C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukkan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Atas kelemahan lingkungan pengendalian lingkungan yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No.	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian
I	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Menyusun kode etik Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004.
		Mensosialisasikan Kode Etik tersebut ke seluruh aparatur Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan.
		Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan kode etik.
II	Komitmen terhadap Kompetensi	Menyusun Standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi pada Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan.
		Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya
III	Kepemimpinan yang Kondusif	Perlu menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan memahami dengan Tupoksi dan uraian tugas masing-masing.
IV	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan (disesuaikan dengan tipologi SOTK Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan)
		Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pimpinan masing-masing pejabat dalam Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan.
V	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan.
		Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud diatas memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain di Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan
		Pegawai yang diberi wewenang tersebut diatas memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP

VI	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia	Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai
		Memberikan prioritas pengembangan SDM Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan untuk menunjang kegiatan
VII	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan
		Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan
		Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan
VIII	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Diwujudkan dengan adanya mekanisme hubungan kerjasama yang baik antar instansi yang terkait dengan rapat-rapat Koordinasi antar SKPD serta adanya pemeriksaan rutin dari BPK dan Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan

BAB IV

RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

A. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Tahun 2016, rencana tindak pengendalian yang disusun Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah disusun pada misi yang tertuang dalam Renstra Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan, dimana dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air
2. Meningkatkan Pengendalian Daya Rusak Air
3. Meningkatkan ketersediaan tampungan sumber- sumber air untuk menunjang konservasi air.

B. Risiko-risiko

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan atas resiko yang mengancam pencapaian tujuan dari misi Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan.

Risiko atas pencapaian tujuan 1:

- Pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan masa tanam petani sehingga dapat menghambat pelaksanaan kegiatan.
- Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada musim hujan sehingga akan mengakibatkan terganggunya pekerjaan.
- Kurangnya alokasi anggaran untuk melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

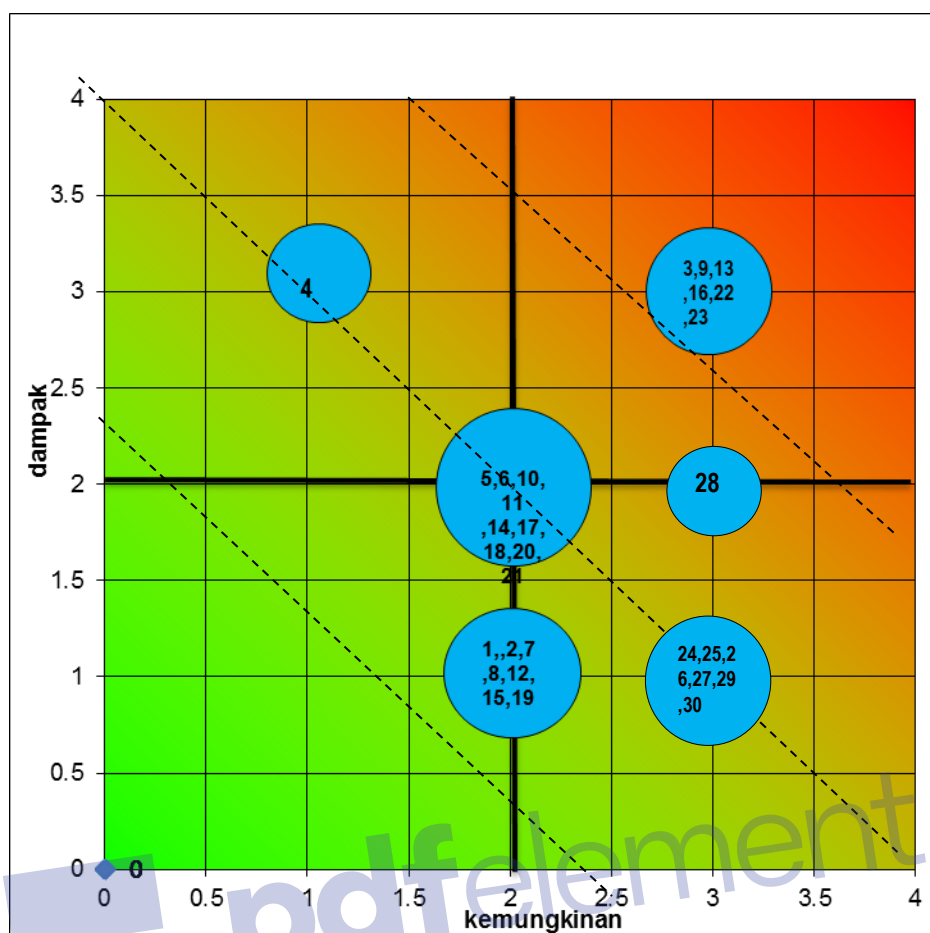
- Rekanan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak sehingga akan mengakibatkan jaringan irigasi tidak dalam kondisi optimal untuk digunakan.
- Tidak tersediannya debit air yang memadai.
- Pelaksanaan kegiatan irigasi tidak tepat sasaran dan kurang efisien.
- Kondisi Jaringan Irigasi tidak terjaga dengan baik.
- Tidak terdistribusinya kebutuhan air irigasi yang memadai.
- Fungsi Catchment Area (daerah tangkapan air) terganggu.

Risiko Pencapaian Tujuan 2:

- Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada musim hujan sehingga akan mengakibatkan terganggunya pekerjaan.
- Kurangnya alokasi anggaran.
- Pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan masa tanam petani sehingga dapat menghambat pelaksanaan kegiatan.
- Tingkat Profesionalisme Penyedia Jasa belum sesuai ekspektasi.
- Air yang masuk ke drainase melebihi Kapasitas Karena terjadi penyempitan dimensi drainase dan tersumbatnya aliran air.
- Tidak tersedianya Prasarana Pengaturan tata air rawa.
- Tidak terdistribusinya aliran air rawa ke daerah sungai dan pantai.

Risiko Pencapaian Tujuan 3:

- Terlambatnya dan tidak selesainya pelaksanaan kontrak kegiatan.
- Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan yang ada pada Dinas.
- Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan dan konservasi dalam pemamfaatan Sumber daya air dan lingkungannya.



Rincian risiko teridentifikasi tertuang dalam lampiran 2

C. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai saat ini, Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan telah membangun berbagai pengendalian untuk pencapaian tujuan pada misi yang diemban oleh Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan. Beberapa pengendalian tersebut dapat dinilai telah efektif, namun beberapa pengendalian lainnya yang telah dilaksanakan kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud. Pengendalian yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Penyampaian informasi juru dilokasi pekerjaan mengenai masa tanam petani.
- Menyusun data base secara swakelola.
- Mengikuti petani dalam kegiatan irigasi.

- d. Membuat kontrak kerja.
- e. Pengawasan langsung ke lapangan.
- f. Proses pemilihan penyedia jasa.

D. Kegiatan Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan.

- a. Pengaturan jadwal di sesuaikan dengan masa tanam petani.
- b. Pengaturan jadwal sesuai dengan informasi dari BMKG.
- c. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas.
- d. Pemilihan rekanan yang berintegritas tinggi.
- e. Mengoptimalkan kinerja PPA dan PBB.
- f. Berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan tentang lokasi yang terganggu.
- g. Menyusun data base irigasi yang lengkap dan akurat.
- h. Meningkatkan partisipasi petani dalam pemasalahan irigasi.
- i. Kegiatan dilaksanakan prioritas.
- j. Membuat Kontak Kerja.
- k. Menyiapkan SOP

Kegiatan pengendalian yang dibangun akan tertuang dalam bentuk kebijakan dan standar operasi prosedur yang terintegrasi dalam aktivitas organisasi.

Rincian kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko tertuang dalam lampiran 3.

BAB V

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan dalam rangka mendukung jalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan oleh Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai dengan rencana dalam RTP adalah:

- a. Merehabilitasi dan memelihara jaringan irigasi yang direncanakan
 - Laporan , Surat.
- b. Optimalnya fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
 - Surat.
- c. Meningkatkan / merehabilitasi jaringan Irigasi (DAK)
 - Laporan , Surat.
- d. Tersedianya database irigasi yang lengkap dan akurat.
 - Laporan.
- e. Meningkatnya partisipasi petani terhadap masalah irigasi
 - Laporan kegiatan, media cetak, internet, dan sosialisasi
- f. Tersedianya bantaran Sungai dan tanggul dengan kondisi baik
 - Laporan kegiatan, media cetak, internet, dan sosialisasi
- g. Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai
 - Laporan kegiatan, media cetak, internet, dan sosialisasi
- h. Pengendalian banjir dari genangan air suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal
 - Laporan kegiatan, media cetak, internet, dan sosialisasi
- i. Pengeringan dari genangan air suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal
 - Laporan kegiatan, media cetak, internet, dan sosialisasi
- j. Tersedianya dokumen perencanaan saluran Drainase dan Gorong-gorong
 - Kontrak Kerja.
- k. Tersedianya dokumen perencanaan normalisasi saluran sungai
 - Kontrak Kerja.

- l. Tersedianya dokumen perencanaan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi
 - Kontrak kerja.
- m. Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan yang ada pada Dinas .
 - SOP.
- n. Terlaksananya pengawasan dan konservasi terhadap pemanfaatan sumber daya air dan lingkungannya
 - Peraturan Bupati.
- o. Tersedianya laporan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan
 - Kontrak Kerja

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran 4.

pdfelement

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan yang diperlukan dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan yang dilaksanakan di Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan adalah Pemantauan Berkelanjutan. Masing-masing unit kerja pada Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan sebagai pemilik risiko akan melakukan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang sesuai dengan uraian tugas masing-masing. Pemantauan berkelanjutan di Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan sesuai dengan risiko-risiko yang ada meliputi sebagai berikut:

- Pemantauan terhadap pembentukan kode etik dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan.
- Pemantauan terhadap SOP kegiatan yang ada di Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan.
- Pemantauan dan Evaluasi atas penerapan standar kompetensi dan penempatan SDM.
- Pemantauan terhadap serapan atau realisasi belanja APBD Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan.

Rincian Pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan tertuang pada lampiran

5

2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan selaku auditor Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dari seluruh kegiatan SKPD Kabupaten Pesisir Selatan atau oleh pihak luar seperti BPKP. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/review dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan tindak lanjutnya.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan laporan atas RTP sesuai tanggung-jawabnya secara berkala kepada Tim pemantau yang dalam hal ini adalah Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Intern Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan Tahun 2019 merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

pdfelement

Lampiran 1

Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian Yang Belum Memadai	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab Pelaksanaan perbaikan	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika			
1	Pengembangan Integritas dan Nilai Etika	Kode Etik Pegawai ASN Pemkab Pessel dalam proses penyusunan.	Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kasi	6 bln
		Pimpinan Instansi mengembangkan sikap etika dan tata nilai yang dapat dimengerti oleh seluruh pegawai	Kepala Dinas	3 bln
2	Pengkomunikasian nilai-nilai etika	Pimpinan Instansi mengkomunikasikan komitmennya akan nilai-nilai etika melalui perkataan dan tindakan	Kepala Dinas	3 bln
II	Komitmen Terhadap Kompetensi			
1	Identifikasi Kompetensi	Evaluasi Kompetensi yang dibutuhkan dievaluasi secara reguler dan dijaga kesinambungannya	Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kasi	1 bln
2	Pemanfaatan Individu yang memiliki kompetensi	Melaksanakan diklat/ pelatihan	Kepala Dinas	
III	Struktur Organisasi yang sesuai dengan kebutuhan			
1	Menjaga Kelangsungan Proses	Garis Pelaporan Pimpinan Instansi mengetahui pentingnya menjaga kelangsungan proses sebagai tujuan verifikasi dari informasi yang dihasilkan dari sistem informasi organisasi	Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kasi	1 bln
IV	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab			
1	Pengawasan atas pengendalian internal dan risiko	Pimpinan Instansi mengawasi proses penentuan tanggung jawab untuk pengendalian internal dan risiko	Kepala Dinas	1 thn
V	Kebijakan Pengembangan SDM			
1	Penerimaan dan retensi pegawai pada posisi kunci	Penerimaan dan retensi pegawai pada posisi kunci didasarkan pada prinsip-prinsip integritas dan kompetensi yang diperlukan sehubungan dengan posisi tersebut	Kepala Dinas	3 bln

Lampiran 2

DAFTAR RISIKO PRIORITAS TERIDENTIFIKASI

No	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko		Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan
1	2		3	4	5	6
1	Tersedianya jaringan irigasi dengan kondisi baik dan memadai	1	Pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan masa tanam petani	Kepala Bidang, Kasi	Rentang waktu pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan masa tanam petani	Pelaksanaan kegiatan dapat dibatalkan atau pindah lokasi serta dapat terlambat dari waktu yang telah ditetapkan
		2	Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada musim hujan		Scedul kegiatan bersamaan dengan musim hujan	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
		3	Kurangnya alokasi anggaran untuk melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi		Kebijakan penganggaran	Belum terpeliharanya jaringan irigasi secara komprehensif
2	Mengoptimalkan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	4	Tidak tersedianya debit air yang memadai	P3A	Daerah tangkapan air terganggu	Terjadinya gagal tanam
		5	Fungsi Catchment Area (daerah tangkapan air) terganggu		Kerusakan kawasan hutan	Tidak tersedianya debit air yang memadai
		6	Tidak terdistribusinya kebutuhan air irigasi yang memadai		Belum optimalnya petugas PPA,PPB dan P3A	Terjadinya kelebihan dan kekurangan air dalam satu Daerah Irigasi
3	Peningkatan/rehabilitasi jaringan Irigasi (DAK)	7	Pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan masa tanam petani	Kepala Bidang, Kasi	Rentang waktu pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan masa tanam petani	Pelaksanaan kegiatan dapat dibatalkan atau pindah lokasi serta dapat terlambat dari waktu yang telah ditetapkan
		8	Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada musim hujan		Scedul kegiatan bersamaan dengan musim hujan	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
		9	Kurangnya alokasi anggaran untuk melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi		Kebijakan penganggaran	Belum terpeliharanya jaringan irigasi secara komprehensif
4	Pembaharuan Database Irigasi	10	Pelaksanaan kegiatan irigasi tidak tepat sasaran dan kurang efisien	Kepala Bidang, Kasi	Database tidak lengkap dan tidak akurat	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan sasaran yang diharapkan
5	WISMP	11	Kondisi jaringan irigasi tidak terjaga dengan baik	Kepala Bidang, Kasi, P3A	Kurang pedulinya petani terhadap kondisi jaringan irigasi (petani tidak partisipatif)	distribusi air ke sawah tidak merata dan optimal

6	Tersedianya Bantaran dan Tanggul sungai dengan kondisi baik	12	Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada musim hujan sehingga akan berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan	KPA, PPTK	Schedul kegiatan bersamaan dengan musim hujan	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
		13	Kurangnya alokasi anggaran	Pemda	Kebijakan penganggaran	Belum tersedianya Bantaran dan Tanggul Sungai dengan kondisi baik secara Menyeluruh
		14	Tingkat Profesionalisme Penyedia Jasa belum sesuai ekspektasi	Kontraktor	Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi	Belum tercapainya sasaran Pekerjaan Bantaran dan Tanggul Sungai dengan kondisi baik secara Menyeluruh
7	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	15	Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada musim hujan sehingga akan berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan	KPA, PPTK	Schedul kegiatan bersamaan dengan musim hujan	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
		16	Kurangnya alokasi anggaran	Pemda	Kebijakan penganggaran	Belum terlaksananya Normalisasi Sungai secara Menyeluruh
		17	Tingkat Profesionalisme Penyedia Jasa belum sesuai ekspektasi	Kontraktor	Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi	Belum tercapainya sasaran Pekerjaan Bantaran dan Tanggul Sungai dengan kondisi baik secara Menyeluruh
8	Pengendalian banjir dari genangan air suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal	18	Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada musim hujan sehingga akan mengakibatkan terganggunya pekerjaan	Kepala Bidang, Kasi	Scedul kegiatan bersamaan dengan musim hujan	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
		19	Air yang masuk ke drainase melebihi Kapasitas karena terjadi penyempitan dimensi drainase dan tersumbatnya aliran air	Kepala Bidang, Kasi	Erosi tanggul drainase yang bergeser dan sedimen dalam drainase	Kurang berfungsi drainase dengan baik
		20	Kurangnya alokasi anggaran yang mengakibatkan tidak tercapai aliran air ke daerah pembuangan , sehingga fungsi drainase kurang optimal	Pemda	Kebijakan penganggaran	Fungsi drainase belum optimal
9	Pengendalian banjir dari genangan air suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara	21	Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada musim hujan sehingga akan mengakibatkan terganggunya	Kepala Bidang, Kasi	Scedul kegiatan bersamaan dengan musim hujan	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

	optimal		pekerjaan			
		22	Tidak tersedianya Prasarana Pengaturan tata air rawa		Kerusakan Pengaturan tata air rawa	Kurang berfungsi pengaturan tata air rawa
		23	Tidak terdistribusinya aliran air rawa kedaerah sungai dan pantai	Masyarakat Sekitar	Kerusakan kawasan Lahan dan hutan	Terjadinya gagal tanam
11	Tersedianya Dokumen Perencanaan Saluran Drainase / Gorong - Gorong	24	Terlambatnya dan tidak selesainya pelaksanaan kontrak kegiatan	Kepala Bidang, Kasi	Kurangnya komitmen dalam pelaksanaan kontrak	Kegiatan pembangunan drainase dan gorong - gorong tidak dapat dilaksanakan
12	Tersedianya dokumen perencanaan normalisasi saluran sungai	25	Terlambatnya dan tidak selesainya pelaksanaan kontrak kegiatan		Kurangnya komitmen dalam pelaksanaan kontrak	Kegiatan normalisasi saluran sungai tidak dapat dilaksanakan
13	Tersedianya dokumen perencanaan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi	26	Terlambatnya dan tidak selesainya pelaksanaan kontrak kegiatan		Kurangnya komitmen dalam pelaksanaan kontrak	Kegiatan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi (DAK) tidak dapat dilaksanakan
14	Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan yang ada pada Dinas	27	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan yang ada pada Dinas		Belum adanya SOP yang jelas dalam melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan	Masih rendahnya realisasi penyerapan anggaran pelaksanaan kegiatan
15	Terlaksananya pengawasan dan konservasi terhadap pemanfaatan sumber daya air dan lingkungannya	28	Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan dan konservasi dalam pemanfaatan Sumber daya air dan lingkungannya		Belum adanya produk hukum yang memadai dalam pengawasan dan konservasi sumber daya air	Terjadinya kerusakan pada ekosistem sumber daya air dan lingkungannya
16	Tersedianya laporan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan	29	Terlambatnya dan tidak selesainya pelaksanaan kontrak kegiatan		Kurangnya komitmen dalam pelaksanaan kontrak	Penyampaian laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tidak tepat waktu
17	Tersedianya dokumen perencanaan pengamanan muara dan pantai	30	Terlambatnya dan tidak selesainya pelaksanaan kontrak kegiatan		Tidak tersedianya anggaran untuk pelaksanaan fisik pengamanan muara dan pantai	Kegiatan pengamanan muara dan pantai tidak dapat dilaksanakan

Lampiran 3

Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian

No	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penang gung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	7	8	9
1	Merehabilitasi dan memelihara jaringan irigasi yang direncanakan	1 Pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan masa tanam petani	Pengaturan jadwal disesuaikan dengan masa tanam petani	Kabid, Kasi	Selama Masa Pelaksanaan Kontrak
		Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada musim hujan	Pengaturan jadwal sesuai dengan informasi dari BMKG		Selama Masa Pelaksanaan Kontrak
		3 Kurangnya alokasi anggaran untuk melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi	Kebijakan anggaran		1 Thn
2	Mengoptimalkan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	4 Tidak tersedianya debit air yang memadai	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jaringan irigasi yang ada	Kabid, Kasi	1 Thn
		5 Fungsi Catchment Area (daerah tangkapan air) terganggu	Penanaman pohon di lokasi yang sudah terganggu	Pemda	Selama Masa Pelaksanaan Kontrak
		6 Tidak terdistribusinya kebutuhan air irigasi yang memadai	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jaringan irigasi yang ada	Kabid, Kasi	Selama Masa Pelaksanaan Kontrak
3	Peningkatan / rehabilitasi jaringan irigasi (DAK)	7 Pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan masa tanam petani	Pengaturan jadwal disesuaikan dengan masa tanam petani	Kabid, Kasi	Selama Masa Pelaksanaan Kontrak
		8 Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada musim hujan	Pengaturan jadwal sesuai dengan informasi dari BMKG		Selama Masa Pelaksanaan Kontrak
		9 Kurangnya alokasi anggaran untuk melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi	Kebijakan anggaran		1 Thn
4	Pembaharuan Database Irigasi	10 Pelaksanaan kegiatan irigasi tidak tepat sasaran dan kurang efisien	Menyusun database menggunakan SDM yang lebih profesional	Kabid, Kasi	1 thn
5	WISMP	11 Kondisi jaringan irigasi tidak terjaga dengan baik	Meningkatkan keterlibatan petani melalui P3A, GP3A dan Komisi Irigasi	Kabid, Kasi	1 thn

6	Tersedianya Bantaran dan Tanggul sungai dengan kondisi baik	12	Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada musim hujan	Pengaturan Jadwal sesuai dengan informasi dari BMKG	Kabid, Kasi	Selama Masa Pelaksanaan Kontrak
		13	Kurangnya Alokasi Anggaran	Kebijakan anggaran	Pemda	1 Thn
		14	Tingkat Profesionalisme Penyedia Jasa belum sesuai ekspektasi	Proses Kualifikasi yang Ketat	Pemda	Selama Masa Pelaksanaan Kontrak
7	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	15	Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada musim hujan sehingga akan berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan	Pengaturan Jadwal sesuai dengan informasi dari BMKG	Kabid, Kasi	Selama Masa Pelaksanaan Kontrak
		16	Kurangnya alokasi anggaran	Kebijakan anggaran	Pemda	1 Thn
		17	Tingkat Profesionalisme Penyedia Jasa belum sesuai ekspektasi	Proses Kualifikasi yang ketat	Pemda	3 bln
8	Pengendalian banjir dari genangan air suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal	18	Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada musim hujan akan mengakibatkan terganggunya pekerjaan	Pengaturan jadwal sesuai dengan informasi dari BMKG	Kabid, Kasi	Selama Masa Pelaksanaan Kontrak
		19	Air yang masuk ke drainase melebihi Kapasitas karena terjadi penyempitan dimensi drainase dan tersumbatnya aliran air	Perbaikan dan Normalisasi Saluran		Selama Masa Pelaksanaan Kontrak
		20	Kurangnya alokasi anggaran yang mengakibatkan tidak tercapai aliran air ke daerah pembuangan , sehingga fungsi drainase kurang optimal	Kegiatan dilaksanakan berdasarkan Prioritas		1 Thn
9	Pengeringan dari genangan air suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal	21	Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada musim hujan akan mengakibatkan terganggunya pekerjaan	Pengaturan jadwal sesuai dengan informasi dari BMKG	Kabid, Kasi	Selama Masa Pelaksanaan Kontrak
		22	Tidak tersedianya Prasarana Pengaturan tata air rawa	Pembuatan Database dan Bangunan Pendukung	Kabid, Kasi	Selama Masa Pelaksanaan Kontrak
10	Tersedianya Dokumen Perencanaan Saluran Drainase / Gorong - Gorong	24	Tersedianya Dokumen Perencanaan Saluran Drainase / Gorong - Gorong		Kabid, Kasi	Selama Masa Pelaksanaan Kontrak
11	Tersedianya dokumen perencanaan normalisasi saluran sungai	25	Tersedianya dokumen perencanaan normalisasi saluran sungai		Kabid, Kasi	Selama Masa Pelaksanaan Kontrak

12	Tersedianya dokumen perencanaan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi	26	Tersedianya dokumen perencanaan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi		Kabid, Kasi	Selama Masa Pelaksanaan Kontrak
13	Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan yang ada pada Dinas	27	Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan yang ada pada Dinas		Kepala Dinas, Kabid Kasi	1 Thn
14	Terlaksananya pengawasan dan konservasi terhadap pemanfaatan sumber daya air dan lingkungannya	28	Terlaksananya pengawasan dan konservasi terhadap pemanfaatan sumber daya air dan lingkungannya	Membuat produk hukum berupa Peraturan Bupati	Kepala Dinas, Kabid Kasi	1 Thn
15	Tersedianya laporan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan	29	Tersedianya laporan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan		Kabid, Kasi	Selama Masa Pelaksanaan Kontrak
16	Tersedianya dokumen perencanaan pengamanan muara dan pantai	30	Tersedianya dokumen perencanaan pengamanan muara dan pantai		Kabid, Kasi	Selama Masa Pelaksanaan Kontrak

 pdfelement

Lampiran 4

Rencana Informasi Dan Komunikasi Pengendalian

No	Tujuan yang Diidentifikasi	Pengendalian Yg Direncanakan	Bentuk/ Sarana Komunikasi	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7
1	Merehabilitasi dan memelihara jaringan irigasi yang direncanakan	Pengaturan jadwal disesuaikan dengan masa tanam petani	Laporan, surat	Kabid	PPTK dan Rekanan	Bulanan
		Pengaturan jadwal sesuai dengan informasi dari BMKG	Surat	Kabid	BMKG	Tahunan
		Kegiatan dilaksanakan berdasarkan Prioritas	Surat, rapat	Kabid	PPTK	Tahunan
2	Optimalnya fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jaringan irigasi yang ada	Surat	Kabid	PPTK, Masyarakat	Bulanan
		Berkoordinasi dengan dinas Lingkungan hidup dan dinas kehutanan tentang lokasi yang terganggu	Surat	Kabid	Instansi Terkait	Tahunan
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jaringan irigasi yang ada	Laporan, rapat	Kabid	PPTK, Masyarakat	Tahunan
3	Meningkatkan / merehabilitasi jaringan Irigasi (DAK)	Pengaturan jadwal disesuaikan dengan masa tanam petani	Laporan, surat	Kabid	PPTK dan Rekanan	Bulanan
		Pengaturan jadwal sesuai dengan informasi dari BMKG	Surat	Kabid	BMKG	Tahunan
		Kegiatan dilaksanakan berdasarkan Prioritas	Surat, rapat	Kabid	PPTK	Tahunan
4	Tersedianya database irigasi yang lengkap dan akurat	Menyusun database menggunakan SDM yang lebih profesional	Laporan	Kabid	Konsultan	Tahunan
5	Meningkatnya partisipasi petani terhadap masalah irigasi	Meningkatkan keterlibatan petani melalui P3A, GP3A dan Komisi Irigasi	Surat, rapat	Kabid	P3A, GP3A, Komisi Irigasi	Bulanan
6	Tersedianya bantaran Sungai dan tanggul dengan kondisi	Pengaturan Jadwal sesuai dengnKG	Laporan Kegiatan, Mesia Cetak, Internet, Sosialisasi	BMKG	Kepala Bidang	Awal tahun

	baik					
		Proses Kualifikasi yang Ketat	Dokumen Perusahaan	Kontraktor	Kepala Bidang	Pertegahan sampai dengan akhir tahun
7	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	Pengaturan Jadwal sesuai dengan KKG	Laporan Kegiatan, Media Cetak, Internet, Sosialisasi	BMKG	Kepala Bidang	Awal tahun
		Proses Kualifikasi yang Ketat	Dokumen Perusahaan	Kontraktor	Kepala Bidang	Pertegahan sampai dengan akhir tahun
8	Pengendalian banjir dari genangan air suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal	Pengaturan jadwal sesuai dengan informasi dari BMKG	Laporan Kegiatan, Media Cetak, Internet, Sosialisasi	BMKG	Kepala Bidang	Awal tahun
		Perbaikan dan Normalisasi Saluran	Informasi dan Komunikasi dgn masyarakat, Identifikasi lapangan	Masyarakat dan Dinas PSDA	Kepala Bidang	Awal tahun
		Kegiatan dilaksanakan berdasarkan Prioritas	Daftar Inventaris Usulan Kegiatan	Dinas PSDA	Kepala Bidang	Awal tahun sampai dengan akhir Tahun
9	Pengeringan dari genangan air suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal	Pengaturan jadwal sesuai dengan informasi dari BMKG	Laporan Kegiatan, Media Cetak, Internet, Sosialisasi	BMKG	Kepala Bidang	Awal tahun
		Pembuatan Database dan Bangunan Pendukung	Laporan Kegiatan, Media Cetak, Internet, Sosialisasi	Masyarakat dan Dinas PSDA	Kepala Bidang	Awal tahun sampai dengan akhir Tahun
10	Tersedianya dokumen perencanaan saluran Drainase dan Gorong	Penyelesaian pekerjaan tepat waktu	Kontrak Kerja	Kepala Bintek	Konsultasi Perencana	April 2019
11	Tersedianya dokumen perencanaan normalisasi saluran sungai	Penyelesaian pekerjaan tepat waktu	Kontrak Kerja	Kepala Bintek	Konsultasi Perencana	April – Oktober 2019
12	Tersedianya dokumen perencanaan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Penyelesaian pekerjaan tepat waktu	Kontrak Kerja	Kepala Bintek	Konsultasi Perencana	April 2019

13	Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan yang ada pada Dinas	Optimalisasi pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi	SOP	Kepala BinteK	Konsulatan Perencana	Maret - Desember 2019
14	Terlaksananya pengawasan dan konservasi terhadap pemanfaatan sumber daya air dan lingkungannya	Optimalisasi pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi	Peraturan Bupati	Kepala BinteK	Konsulatan Perencana	Maret - Desember 2019
15	Tersedianya laporan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Penyelesaian pekerjaan tepat waktu	Kontrak Kerja	Kepala BinteK	Konsulatan Perencana	November 2019
16	Tersedianya dokumen perencanaan pengamanan muara dan pantai	Penyelesaian pekerjaan tepat waktu	Kontrak Kerja	Kepala BinteK	Konsulatan Perencana	Oktober 2019

pdfelement

Lampiran 5

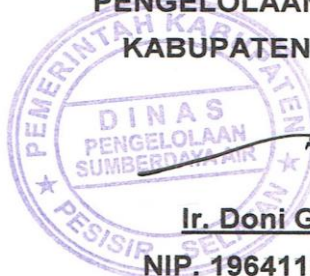
Rancangan Pemantauan Berkelanjutan Atas Pengendalian

No	Tujuan	Pengendalian yang direncanakan	Bentuk/ Metode Pemantauan yang diperlukan	Penanggung jawab Pelaksanaan Pemantauan	Waktu Pelaksanaan Pemantauan
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya jaringan irigasi dengan kondisi baik dan memadai	Pengaturan jadwal disesuaikan dengan masa tanam petani	Berkelanjutan	Atasan Langsung	Triwulan IV
2	Mengoptimalkan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jaringan irigasi yang ada	Berkelanjutan	Atasan Langsung	Triwulan IV
3	Meningkatkan / merehabilitasi jaringan Irigasi (DAK)	Pengaturan jadwal disesuaikan dengan masa tanam petani	Berkelanjutan	Atasan Langsung	Triwulan IV
4	Tersedianya database irigasi yang lengkap dan akurat	Menyusun database menggunakan SDM yang lebih profesional	Berkelanjutan	Atasan Langsung	Triwulan IV
5	Meningkatnya partisipasi petani terhadap masalah irigasi	Meningkatkan keterlibatan petani melalui P3A, GP3A dan Komisi Irigasi	Berkelanjutan	Atasan Langsung	Triwulan IV
6	Tersedianya bantaran Sungai dan tanggul dengan kondisi baik	Pengaturan Jadwal sesuai dengan BMKG	Berkelanjutan	Kabid, Kasi	Awal sampai dengan akhir tahun
7	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	Pengaturan Jadwal sesuai dengan KGI	Berkelanjutan	Kabid, Kasi	Awal sampai dengan akhir tahun
8	Pengendalian banjir dari genangan air suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jaringan irigasi yang ada	Berkelanjutan	Kabid, Kasi	Awal sampai dengan akhir tahun
9	Pengeringan dari genangan air suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemeliharaan sarana irigasi yang ada	Berkelanjutan	Kabid, Kasi	Awal sampai dengan akhir tahun
10	Tersedianya Dokumen Perencanaan Saluran Drainase / Gorong – Gorong	Penyelesaian pekerjaan tepat waktu	Berkelanjutan	Atasan langsung	Triwulan IV

11	Tersedianya dokumen perencanaan normalisasi saluran sungai	Penyelesaian pekerjaan tepat waktu	Berkelanjutan	Atasan langsung	Triwulan IV
12	Tersedianya dokumen perencanaan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Penyelesaian pekerjaan tepat waktu	Berkelanjutan	Atasan langsung	Triwulan IV
13	Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan yang ada pada Dinas	Optimalisasi pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi	Berkelanjutan	Atasan langsung	Triwulan IV
14	Terlaksananya pengawasan dan konservasi terhadap pemanfaatan sumber daya air dan lingkungannya	Optimalisasi pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi	Berkelanjutan	Atasan langsung	Triwulan IV
15	Tersedianya laporan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Penyelesaian pekerjaan tepat waktu	Berkelanjutan	Atasan langsung	Triwulan IV
16	Tersedianya dokumen perencanaan pengamanan muara dan pantai	Penyelesaian pekerjaan tepat waktu	Berkelanjutan	Atasan langsung	Triwulan IV

Painan, April 2019

**KEPALA DINAS
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Ir. Doni Gusrizal, M.M.
NIP. 19641106 199703 1 001

IDENTIFIKASI TUJUAN STRATEGIS

VISI : TERWUJUDNYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR YANG MENYELURUH, TERPADU, BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Kegiatan yang mendukung capaian tujuan/sasaran
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perekonomian dan Infrastruktur Sosial yang Terkait Sektor Unggulan	Menyelenggarakan pembangunan bidang sumber daya air	Meningkatnya irigasi kondisi baik	1. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 2. Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
2		Meningkatkan pengendalian daya rusak air	Berkurangnya dampak daya rusak air	1. Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 2. Pembangunan saluran drainase /gorong-gorong
3		Meningkatkan ketersediaan tampungan sumber-sumber air untuk meenunjang konservasi air	Meningkatnya kapasitas tampungan sumber-sumber air	

Catatan:

Uraian Visi berisi visi unit organisasi di baris atas kolom

1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian misi sesuai dengan dokumen Renstra
3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan dokumen renstra
4. Kolom 4 berisi uraian tentang sasaran yang selaras dokumen renstra
5. Kolom 5 berisi uraian tentang kegiatan yang mendukung capaian tujuan strategis

IDENTIFIKASI TUJUAN STRATEGIS

No	Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Keselarasn dengan tujuan/sasaran strategis	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi yang direncanakan	tidak selaras	Tersedianya jaringan irigasi dengan kondisi baik dan memadai
2	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	selaras	
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi yang direncanakan	tidak selaras	Tersedianya jaringan irigasi dengan kondisi
4	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	selaras	
5	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pengendalian banjir dari genangan air suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal	Belum selaras	Terlaksananya Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
6	Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendalian banjir	Pengeringan dari genangan air suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal	Belum selaras	Terlaksananya pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendalian banjir
7	Perencanaan pembangunan saluran drainase / gorong - gorong	Dokumen DED Saluran Drainase / Gorong - Gorong	tidak selaras	Tersedianya Dokumen Perencanaan Saluran Drainase / Gorong - Gorong
8	Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai	Tersedianya dokumen perencanaan normalisasi saluran sungai	selaras	
9	Perencanaan peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Perencanaan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi	tidak selaras	Tersedianya dokumen perencanaan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi

10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Adanya Kontrol dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya	tidak selaras	Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan yang ada pada Dinas
11	Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Air	Adanya pengawasan dan konservasi sumber daya air pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan lainnya	tidak selaras	Terlaksananya pengawasan dan konservasi terhadap pemanfaatan sumber daya air dan lingkungannya
12	Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	tidak selaras	Tersedianya laporan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan
13	Perencanaan prasarana pengamanan muara dan pantai	Adanya dokumen review Pantai Painan Selatan	tidak selaras	Tersedianya dokumen perencanaan pengamanan muara dan pantai

Catatan:

1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko
3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan atas kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko
4. Kolom 4 berisi uraian tentang keselarasan tujuan kegiatan dengan tujuan/sasaran di atasnya (strategis)

IDENTIFIKASI RISIKO

SKPD : DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KAB. PESISIR SELATAN

No	Kegiatan	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan
1		2	3	4	5	6
1	Rehabilitasi / Pemeliharaan jaringan irigasi	Tersedianya jaringan irigasi dengan kondisi baik dan memadai (..km)	Pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan masa tanam petani sehingga dapat menghambat pelaksanaan pekerjaan	Kepala Bidang, Kasi	Rentang waktu pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan masa tanam petani	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
			Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada musim hujan sehingga akan mengakibatkan terganggunya pekerjaan	PPTK	Schedule kegiatan bersamaan dengan musim hujan	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
			Kurangnya alokasi anggaran akan menghambat terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi	Pemda	Kebijakan penganggaran	Belum terpeliharanya jaringan irigasi secara komprehensif
			Rekanan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak sehingga akan mengakibatkan jaringan irigasi tidak dalam kondisi optimal untuk digunakan	PPTK	Proses pemilihan rekanan tidak tepat (PL/Tender)	Tidak tersedianya jaringan irigasi dalam kondisi baik
2	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	Optimalnya fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	Tidak tersedianya debit air yang memadai	P3A	Daerah tangkapan air terganggu	Terjadinya gagal tanam
			Fungsi Catchment Area (daerah tangkapan air) terganggu	P3A	Kerusakan kawasan hutan	Tidak tersedianya debit air yang memadai
			Tidak terdistribusinya kebutuhan air irigasi yang memadai	P3A	Belum optimalnya petugas PPA,PPB dan P3A	Terjadinya kelebihan dan kekurangan air dalam satu Daerah Irigasi
3	Peningkatan/rehabilitasi jaringan Irigasi (DAK)	Tersedianya jaringan irigasi dengan kondisi baik dan memadai (..km)	Pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan masa tanam petani sehingga dapat menghambat pelaksanaan pekerjaan	Kepala Bidang, Kasi	Rentang waktu pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan masa tanam petani	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
			Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada musim hujan sehingga akan mengakibatkan terganggunya pekerjaan	PPTK	Schedule kegiatan bersamaan dengan musim hujan	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
			Kurangnya alokasi anggaran akan menghambat terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi	Pemda	Kebijakan penganggaran	Belum terpeliharanya jaringan irigasi secara komprehensif
			Rekanan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak sehingga akan mengakibatkan jaringan irigasi tidak dalam kondisi optimal untuk digunakan	PPTK	Proses pemilihan rekanan tidak tepat (PL/Tender)	Tidak tersedianya jaringan irigasi dalam kondisi baik
4	Pembaharuan Database Irigasi	Tersedianya database irigasi yang lengkap dan akurat	Pelaksanaan kegiatan irigasi tidak tepat sasaran dan kurang efisien	Kepala Bidang, Kasi	Database tidak lengkap dan tidak akurat	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang diharapkan
5	WISMP	Meningkatnya partisipasi petani terhadap masalah irigasi	Kondisi jaringan irigasi tidak terjaga dengan baik	Kepala Bidang, Kasi, P3A	Kurang pedulinya petani terhadap kondisi jaringan irigasi (petani tidak partisipatif)	distribusi air ke sawah tidak merata dan optimal

6	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	Tersedianya Bantaran dan Tanggul sungai dengan kondisi baik	Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada musim hujan sehingga akan berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan	KPA, PPTK	Schedul kegiatan bersamaan dengan musim hujan	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
			Kurangnya alokasi anggaran	Pemda	Kebijakan penganggaran	Belum tersedianya Bantaran dan Tanggul Sungai dengan kondisi baik secara Menyeluruh
			Tingkat Profesionalisme Penyedia Jasa belum sesuai ekspektasi	Kontraktor	Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi	Belum tercapainya sasaran Pekerjaan Bantaran dan Tanggul Sungai dengan kondisi baik secara Menyeluruh
7	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada musim hujan sehingga akan berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan	KPA, PPTK	Schedul kegiatan bersamaan dengan musim hujan	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
			Kurangnya alokasi anggaran	Pemda	Kebijakan penganggaran	Belum terlaksananya Normalisasi Sungai secara Menyeluruh
			Tingkat Profesionalisme Penyedia Jasa belum sesuai ekspektasi	Kontraktor	Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi	Belum tercapainya sasaran Pekerjaan Bantaran dan Tanggul Sungai dengan kondisi baik secara Menyeluruh
8	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pengendalian banjir dari genangan air suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal	Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada musim hujan sehingga akan mengakibatkan terganggunya pekerjaan	Kepala Bidang, Kasi	Scedul kegiatan bersamaan dengan musim hujan	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
			Air yang masuk ke drainase melebihi Kapasitas karena terjadi penyempitan dimensi drainase dan tersumbatnya aliran air	Kepala Bidang, Kasi	Erosi tanggul drainase yang bergeser dan sedimen dalam drainae	Kurang berfungsi drainase dengan baik
			Kurangnya alokasi anggaran yang mengakibatkan tidak tercapai aliran air ke daerah pembuangan , sehingga fungsi drainase kurang optimal	Pemda	Kebijakan penganggaran	Fungsi drainase belum optimal
9	Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendalian banjir	Pengeringan dari genangan air suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal	Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada musim hujan sehingga akan mengakibatkan terganggunya pekerjaan	Kepala Bidang, Kasi	Scedul kegiatan bersamaan dengan musim hujan	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
			Tidak tersedianya Prasarana Pengaturan tata air rawa	Kepala Bidang, Kasi	Kerusakan Pengaturan tata air rawa	Kurang berfungsi pengaturan tata air rawa
			Tidak terdistribusinya aliran air rawa kedaerah sungai dan pantai	Masyarakat Sekitar	Kerusakan kawasan Lahan dan hutan	Terjadinya gagal tanam
10	Perencanaan pembangunan saluran drainase / gorong - gorong	Tersedianya Dokumen Perencanaan Saluran Drainase / Gorong - Gorong	Terlambatnya dan tidak selesainya pelaksanaan kontrak kegiatan	Kepala Bidang, Kasi	Kurangnya komitmen dalam pelaksanaan kontrak	Kegiatan pembangunan drainase dan gorong - gorong tidak dapat dilaksanakan
11	Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai	Tersedianya dokumen perencanaan normalisasi saluran sungai	Terlambatnya dan tidak selesainya pelaksanaan kontrak kegiatan	Kepala Bidang, Kasi	Kurangnya komitmen dalam pelaksanaan kontrak	Kegiatan normalisasi saluran sungai tidak dapat dilaksanakan
12	Perencanaan peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Tersedianya dokumen perencanaan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Terlambatnya dan tidak selesainya pelaksanaan kontrak kegiatan	Kepala Bidang, Kasi	Kurangnya komitmen dalam pelaksanaan kontrak	Kegiatan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi (DAK) tidak dapat dilaksanakan
13	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan yang ada pada Dinas	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan yang ada pada Dinas	Kepala Bidang, Kasi	Belum adanya SOP yang jelas dalam melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan	Masih rendahnya realisasi penyerapan anggaran pelaksanaan kegiatan

14	Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Air	Terlaksananya pengawasan dan konservasi terhadap pemanfaatan sumber daya air dan lingkungannya	Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan dan konservasi dalam pemanfaatan Sumber daya air dan lingkungannya	Kepala Bidang, Kasi	Belum adanya produk hukum yang memadai dalam pengawasan dan konservasi sumber daya air	Terjadinya kerusakan pada ekosistem sumber daya air dan lingkungannya
15	Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Tersedianya laporan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Terlambatnya dan tidak selesainya pelaksanaan kontrak kegiatan	Kepala Bidang, Kasi	Kurangnya komitmen dalam pelaksanaan kontrak	Penyampaian laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tidak tepat waktu
16	Perencanaan prasarana pengaman muara dan pantai	Tersedianya dokumen perencanaan pengaman muara dan pantai	Terlambatnya dan tidak selesainya pelaksanaan kontrak kegiatan	Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kasi	Tidak tersedianya anggaran untuk pelaksanaan fisik pengaman muara dan pantai	Kegiatan pengaman muara dan pantai tidak dapat dilaksanakan

Ket:

- 1 Kolom 1 berisi no urut
- 2 Kolom 2 berisi uraian tujuan yang diidentifikasi
- 3 Kolom 3 berisi uraian risiko yang diidentifikasi
- 4 Kolom 4 berisi pemilik atau pihak yang bertanggung jawab menangani risiko tersebut
- 5 (fasilitator agar mengarahkan peserta diskusi untuk
- 6 Kolom 6 berisi dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi



ANALISIS RISIKO

SKPD : DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KAB. PESISIR SELATAN

No	Tujuan yang diidentifikasi		Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan	Skor Kemungkinan terjadi	Skor Dampak	Total Skor (7x8)
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Tersedianya jaringan irigasi dengan kondisi baik dan memadai	1	Pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan masa tanam petani	Kepala Bidang, Kasi	Rentang waktu pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan masa tanam petani	Pelaksanaan kegiatan dapat dibatalkan atau pindah lokasi serta dapat terlambat dari waktu yang telah ditetapkan	2.00	1.00	2.00
		2	Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada musim hujan		Scedul kegiatan bersamaan dengan musim hujan	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	2.00	1.00	2.00
		3	Kurangnya alokasi anggaran untuk melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi		Kebijakan penganggaran	Belum terpeliharanya jaringan irigasi secara komprehensif	3.00	3.00	9.00
2	Mengoptimalkan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	4	Tidak tersedianya debit air yang memadai	P3A	Daerah tangkapan air terganggu	Terjadinya gagal tanam	1.00	3.00	3.00
		5	Fungsi Catchment Area (daerah tangkapan air) terganggu	P3A	Kerusakan kawasan hutan	Tidak tersedianya debit air yang memadai	2.00	2.00	4.00
		6	Tidak terdistribusinya kebutuhan air irigasi yang memadai	P3A	Belum optimalnya petugas PPA,PPB dan P3A	Terjadinya kelebihan dan kekurangan air dalam satu Daerah Irigasi	2.00	2.00	4.00
3	Peningkatan/rehabilitasi jaringan Irigasi (DAK)	7	Pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan masa tanam petani	Kepala Bidang, Kasi	Rentang waktu pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan masa tanam petani	Pelaksanaan kegiatan dapat dibatalkan atau pindah lokasi serta dapat terlambat dari waktu yang telah ditetapkan	2.00	1.00	2.00
		8	Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada musim hujan		Scedul kegiatan bersamaan dengan musim hujan	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	2.00	1.00	2.00
		9	Kurangnya alokasi anggaran untuk melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi		Kebijakan penganggaran	Belum terpeliharanya jaringan irigasi secara komprehensif	3.00	3.00	9.00
4	Pembaharuan Database Irigasi	10	Pelaksanaan kegiatan irigasi tidak tepat sasaran dan kurang efisien	Kepala Bidang, Kasi	Database tidak lengkap dan tidak akurat	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan sasaran yang diharapkan	2.00	2.00	4.00
5	WISMP	11	Kondisi jaringan irigasi tidak terjaga dengan baik	Kepala Bidang, Kasi, P3A	Kurang pedulinya petani terhadap kondisi jaringan irigasi (petani tidak partisipatif)	distribusi air ke sawah tidak merata dan optimal	2.00	2.00	4.00
6	Tersedianya Bantaran dan Tanggul sungai dengan kondisi baik	12	Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada musim hujan sehingga akan berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan	KPA, PPTK	Schedul kegiatan bersamaan dengan musim hujan	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	2	1	2.00

		13	Kurangnya alokasi anggaran	Pemda	Kebijakan penganggaran	Belum tersedianya Bantaran dan Tanggul Sungai dengan kondisi baik secara Menyeluruh	3	3	9.00
		14	Tingkat Profesionalisme Penyedia Jasa belum sesuai ekspektasi	Kontraktor	Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi	Belum tercapainya sasaran Pekerjaan Bantaran dan Tanggul Sungai dengan kondisi baik secara Menyeluruh	2	2	4.00
7	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	15	Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada musim hujan sehingga akan berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan	KPA, PPTK	Schedul kegiatan bersamaan dengan musim hujan	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	2	1	2.00
		16	Kurangnya alokasi anggaran	Pemda	Kebijakan penganggaran	Belum terlaksananya Normalisasi Sungai secara Menyeluruh	3	3	9.00
		17	Tingkat Profesionalisme Penyedia Jasa belum sesuai ekspektasi	Kontraktor	Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi	Belum tercapainya sasaran Pekerjaan Bantaran dan Tanggul Sungai dengan kondisi baik secara Menyeluruh	2	2	4.00
8	Pengendalian banjir dari genangan air suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal	18	Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada musim hujan sehingga akan mengakibatkan terganggunya pekerjaan	Kepala Bidang, Kasi	Scedul kegiatan bersamaan dengan musim hujan	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	2	2	4.00
		19	Air yang masuk ke drainase melebihi Kapasitas karena terjadi penyempitan dimensi drainase dan tersumbatnya aliran air	Kepala Bidang, Kasi	Erosi tanggul drainase yang bergeser dan sedimen dalam drainae	Kurang berfungsi drainase dengan baik	2	1	2.00
		20	Kurangnya alokasi anggaran yang mengakibatkan tidak tercapai aliran air ke daerah pembuangan , sehingga fungsi drainase kurang optimal	Pemda	Kebijakan penganggaran	Fungsi drainase belum optimal	2	2	4.00
9	Pengendalian banjir dari genangan air suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal	21	Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada musim hujan sehingga akan mengakibatkan terganggunya pekerjaan	Kepala Bidang, Kasi	Scedul kegiatan bersamaan dengan musim hujan	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	2	2	4.00
		22	Tidak tersedianya Prasarana Pengaturan tata air rawa	Kepala Bidang, Kasi	Kerusakan Pengaturan tata air rawa	Kurang berfungsi pengaturan tata air rawa	3	3	9.00
		23	Tidak terdistribusinya aliran air rawa kedaerah sungai dan pantai	Masyarakat Sekitar	Kerusakan kawasan Lahan dan hutan	Terjadinya gagal tanam	3	3	9.00
10	Tersedianya Dokumen Perencanaan Saluran Drainase / Gorong - Gorong	24	Terlambatnya dan tidak selesainya pelaksanaan kontrak kegiatan	Kepala Bidang, Kasi	Kurangnya komitmen dalam pelaksanaan kontrak	Kegiatan pembangunan drainase dan gorong - gorong tidak dapat dilaksanakan	3	1	3.00
11	Tersedianya dokumen perencanaan normalisasi saluran sungai	25	Terlambatnya dan tidak selesainya pelaksanaan kontrak kegiatan	Kepala Bidang, Kasi	Kurangnya komitmen dalam pelaksanaan kontrak	Kegiatan normalisasi saluran sungai tidak dapat dilaksanakan	3	1	3.00
12	Tersedianya dokumen perencanaan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi	26	Terlambatnya dan tidak selesainya pelaksanaan kontrak kegiatan	Kepala Bidang, Kasi	Kurangnya komitmen dalam pelaksanaan kontrak	Kegiatan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi (DAK) tidak dapat dilaksanakan	3	1	3.00

13	Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan yang ada pada Dinas	27	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan yang ada pada Dinas	Kepala Bidang, Kasi	Belum adanya SOP yang jelas dalam melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan	Masih rendahnya realisasi penyerapan anggaran pelaksanaan kegiatan	3	1	3.00
14	Terlaksananya pengawasan dan konservasi terhadap pemanfaatan sumber daya air dan lingkungannya	28	Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan dan konservasi dalam pemanfaatan Sumber daya air dan lingkungannya	Kepala Bidang, Kasi	Belum adanya produk hukum yang memadai dalam pengawasan dan konservasi sumber daya air	Terjadinya kerusakan pada ekosistem sumber daya air dan lingkungannya	3	2	6.00
15	Tersedianya laporan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan	29	Terlambatnya dan tidak selesainya pelaksanaan kontrak kegiatan	Kepala Bidang, Kasi	Kurangnya komitmen dalam pelaksanaan kontrak	Penyampaian laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tidak tepat waktu	3	1	3.00
16	Tersedianya dokumen perencanaan pengamanan muara dan pantai	30	Terlambatnya dan tidak selesainya pelaksanaan kontrak kegiatan	Kepala Bidang, Kasi	Tidak tersedianya anggaran untuk pelaksanaan fisik pengamanan muara dan pantai	Kegiatan pengamanan muara dan pantai tidak dapat dilaksanakan	3	1	3.00

3 Kolom 3 berisi pemilik atau pihak yang bertanggung jawab menangani risiko tersebut

4 Kolom 4 berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko

5 Kolom 5 berisi dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi

6 Kolom 6 berisi nilai kemungkinan apabila risiko tersebut terjadi

7 Kolom 7 berisi nilai Dampak terjadinya risiko tersebut.

8 Kolom 8 berisi perkalian antara kolom 6 dan kolom 7



[illegible]

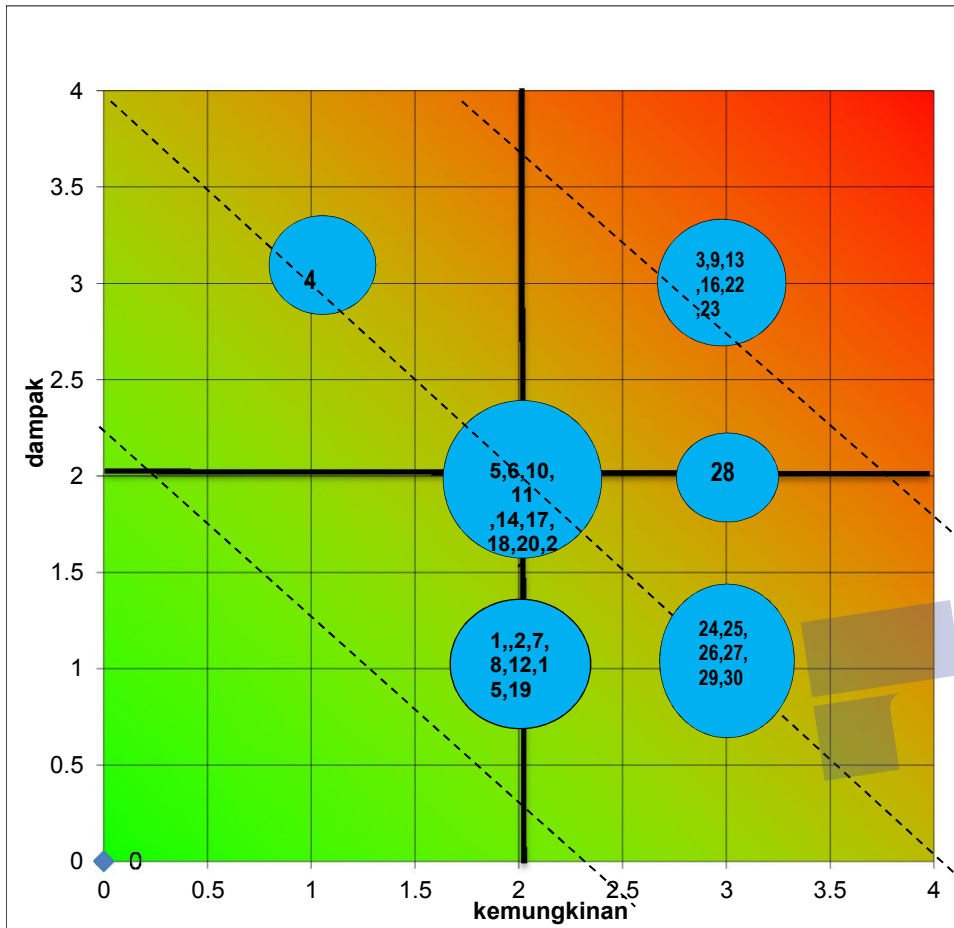
Skala Kemungkinan

- 1 Sangat jarang
2 Jarang
3 Sering
4 Sangat sering

Skala Dampak

- 1 Sangat rendah
2 rendah
3 tinggi
4 Sangat tinggi





Keterangan:

Tingkat I : Level risiko sangat rendah

Tingkat II : Level risiko rendah

Tingkat III : Level risiko tinggi

Tingkat IV : Level risiko sangat tinggi

Lampiran I

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian Yang Belum Memadai	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab Pelaksanaan perbaikan	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika			
1	Pengembangan Integritas dan Nilai Etika	Kode Etik Pegawai ASN Pemkab Pessel dalam proses penyusunan.	Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kasi	6 bln
		Pimpinan Instansi mengembangkan sikap etika dan tata nilai yang dapat dimengerti oleh seluruh pegawai	Kepala Dinas	3 bln
2	Pengomukasian nilai-nilai etika	Pimpinan Instansi mengkomunikasikan komitmennya akan nilai-nilai etika melalui perkataan dan tindakan	Kepala Dinas	3 bln
II	Komitmen Terhadap Kompetensi			
1	Identifikasi Kompetensi	Evaluasi Kompetensi — Kompetensi yang dibutuhkan dievaluasi secara regular dan dijaga kesinambungannya	Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kasi	1 bln
2	Pemanfaatan Individu yang memiliki kompetensi	Melaksanakan diklat/ pelatihan	Kepala Dinas	
III	Struktur Organisasi yang sesuai dengan kebutuhan			
1	Menjaga Kelangsungan Proses	Garis Pelaporan Pimpinan Instansi mengetahui pentingnya menjaga kelangsungan proses sebagai tujuan verifikasi dari informasi yang dihasilkan dari sistem informasi organisasi	Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kasi	1 bln
IV	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab			
1	Pengawasan atas pengendalian internal dan risiko	Pimpinan Instansi mengawasi proses penentuan tanggung jawab untuk pengendalian internal dan risiko	Kepala Dinas	1 thn
V	Kebijakan Pengembangan SDM			
1	Penerimaan dan retensi pegawai pada posisi kunci	Penerimaan dan retensi pegawai pada posisi kunci didasarkan pada prinsip-prinsip integritas dan kompetensi yang diperlukan sehubungan dengan posisi tersebut	Kepala Dinas	3 bln

RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN

SKPD : DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

No	Tujuan yang didentifikasi	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	7	8	9
1	Merehabilitasi dan memelihara jaringan irigasi yang direncanakan	1 Pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan masa tanam petani	Pengaturan jadwal disesuaikan dengan masa tanam petani	Kabid, Kasi	Selama Masa Pelaksanaan Kontrak
		2 Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada musim hujan	Pengaturan jadwal sesuai dengan informasi dari BMKG	Kabid, Kasi	Selama Masa Pelaksanaan Kontrak
		3 Kurangnya alokasi anggaran untuk melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi		Kabid, Kasi	1 Thn
2	Mengoptimalkan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	4 Tidak tersedianya debit air yang memadai	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jaringan irigasi yang ada	Kabid, Kasi	1 Thn
		5 Fungsi Catchment Area (daerah tangkapan air) terganggu	Penanaman pohon di lokasi yang sudah terganggu	Pemda	Selama Masa Pelaksanaan Kontrak
		6 Tidak terdistribusinya kebutuhan air irigasi yang memadai	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jaringan irigasi yang ada	Kabid, Kasi	Selama Masa Pelaksanaan Kontrak
3	Peningkatan / rehabilitasi jaringan Irigasi (DAK)	7 Pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan masa tanam petani	Pengaturan jadwal disesuaikan dengan masa tanam petani	Kabid, Kasi	Selama Masa Pelaksanaan Kontrak
		8 Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada musim hujan	Pengaturan jadwal sesuai dengan informasi dari BMKG	Kabid, Kasi	Selama Masa Pelaksanaan Kontrak
		9 Kurangnya alokasi anggaran untuk melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi		Kabid, Kasi	1 Thn
4	Pembaharuan Database Irigasi	10 Pelaksanaan kegiatan irigasi tidak tepat sasaran dan kurang efisien	Menyusun database menggunakan SDM yang lebih profesional	Kabid, Kasi	1 thn

No	Tujuan yang didentifikasi	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	7	8	9
5	WISMP	11 Kondisi jaringan irigasi tidak terjaga dengan baik	Meningkatkan keterlibatan petani melalui P3A, GP3A dan Komisi Irigasi	Kabid, Kasi	1 thn
6	Tersedianya Bantaran dan Tanggul sungai dengan kondisi baik	12 Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada musim hujan	Pengaturan Jadwal sesuai dengan informasi dari BMKG	Kabid, Kasi	Selama Masa Pelaksanaan Kontrak
		13 Kurangnya Alokasi Anggaran		Pemda	1 Thn
		14 Tingkat Profesionalisme Penyedia Jasa belum sesuai ekspektasi	Proses Kualifikasi yang Ketat	Pemda	Selama Masa Pelaksanaan Kontrak
7	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	15 Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada musim hujan sehingga akan berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan	Pengaturan Jadwal sesuai dengan informasi dari BMKG	Kabid, Kasi	Selama Masa Pelaksanaan Kontrak
		16 Kurangnya alokasi anggaran		Pemda	1 Thn
		17 Tingkat Profesionalisme Penyedia Jasa belum sesuai ekspektasi	Proses Kualifikasi yang ketat	Pemda	3 bln
8	Pengendalian banjir dari genangan air suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal	18 Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada musim hujan sehingga akan mengakibatkan terganggunya pekerjaan	Pengaturan jadwal sesuai dengan informasi dari BMKG	Kabid, Kasi	Selama Masa Pelaksanaan Kontrak
		19 Air yang masuk ke drainase melebihi Kapasitas karena terjadi penyempitan dimensi drainase dan tersumbatnya aliran air	Perbaikan dan Normalisasi Saluran	Kabid, Kasi	Selama Masa Pelaksanaan Kontrak
		20 Kurangnya alokasi anggaran yang mengakibatkan tidak tercapai aliran air ke daerah pembuangan , sehingga fungsi drainase kurang optimal	Kegiatan dilaksanakan berdasarkan Prioritas	Kabid, Kasi	1 Thn
9	Pengeringan dari genangan air suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal	21 Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada musim hujan sehingga akan mengakibatkan terganggunya pekerjaan	Pengaturan jadwal sesuai dengan informasi dari BMKG	Kabid, Kasi	Selama Masa Pelaksanaan Kontrak
		22 Tidak tersedianya Prasarana Pengaturan tata air rawa	Pembuatan Database dan Bangunan Pendukung	Kabid, Kasi	Selama Masa Pelaksanaan Kontrak

No	Tujuan yang didentifikasi	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	7	8	9
		23 Tidak terdistribusinya aliran air rawa kedaerah sungai dan pantai			
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan Saluran Drainase / Gorong - Gorong	24 Tersedianya Dokumen Perencanaan Saluran Drainase / Gorong - Gorong		Kepala Bidang, Kasi,	Selama Masa Pelaksanaan Kontrak
2	Tersedianya dokumen perencanaan normalisasi saluran sungai	25 Tersedianya dokumen perencanaan normalisasi saluran sungai		Kepala Bidang, Kasi	Selama Masa Pelaksanaan Kontrak
3	Tersedianya dokumen perencanaan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi	26 Tersedianya dokumen perencanaan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi		Kepala Bidang, Kasi	Selama Masa Pelaksanaan Kontrak
4	Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan yang ada pada Dinas	27 Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan yang ada pada Dinas		Kepala Dinas,Kepala Bidang, Kasi	1 Thn
5	Terlaksananya pengawasan dan konservasi terhadap pemanfaatan sumber daya air dan lingkungannya	28 Terlaksananya pengawasan dan konservasi terhadap pemanfaatan sumber daya air dan lingkungannya	Membuat produk hukum berupa Peraturan Bupati	Kepala Dinas,Kepala Bidang, Kasi	1 Thn
6	Tersedianya laporan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan	29 Tersedianya laporan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan		Kepala Bidang, Kasi	Selama Masa Pelaksanaan Kontrak
7	Tersedianya dokumen perencanaan pengamanan muara dan pantai	30 Tersedianya dokumen perencanaan pengamanan muara dan pantai		Kepala Bidang, Kasi	Selama Masa Pelaksanaan Kontrak

Ket:

- 1 Kolom 1 Diisi dengan nomor urut
- 2 Kolom 2 Diisi uraian risiko yang diidentifikasi
- 3 Kolom 3 Diisi dengan Pengendalian yang harus ada atas Risiko
- 4 Kolom 4 Diisi Pengendalian yang sudah ada
- 5 Kolom 5 Diisi Efektivitas Pengendalian yang ada
- 6 Kolom 6 Diisi Pengendalian yang masih dibutuhkan
- 7 Kolom 7 Diisi dengan nama Penanggungjawab untuk pengendalian
- 8 Kolom 8 Diisi dengan rencana waktu pelaksanaan perbaikan pengendalian

RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN

SKPD : DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

No	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang Harus ada	Pengendalian yang sudah ada	Efektivitas Pengendalian yang ada	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Merehabilitasi dan memelihara jaringan irigasi yang direncanakan	1 Pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan masa tanam petani	Pengaturan jadwal disesuaikan dengan masa tanam petani	Penyampaian informasi melalui juru dilokasi pekerjaan mengenai masa tanam petani	cukup efektif	Pengaturan jadwal disesuaikan dengan masa tanam petani	Kabid, Kasi	Selama Masa Pelaksanaan Kontrak
		2 Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada musim hujan	Pengaturan jadwal sesuai dengan informasi dari BMKG		kurang efektif	Pengaturan jadwal sesuai dengan informasi dari BMKG	Kabid, Kasi	Selama Masa Pelaksanaan Kontrak
		3 Kurangnya alokasi anggaran untuk melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi	Kegiatan dilaksanakan berdasarkan Prioritas		cukup efektif		Kabid, Kasi	1 Thn
2	Mengoptimalkan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	4 Tidak tersedianya debit air yang memadai	Mengoptimalkan kinerja PPA dan PBB		cukup efektif	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jaringan irigasi yang ada	Kabid, Kasi	1 Thn
		5 Fungsi Catchment Area (daerah tangkapan air) terganggu	Berkoordinasi dengan dinas Lingkungan hidup dan dinas kehutanan tentang lokasi yang terganggu			Penanaman pohon di lokasi yang sudah terganggu	Pemda	Selama Masa Pelaksanaan Kontrak
		6 Tidak terdistribusinya kebutuhan air irigasi yang memadai	Mengoptimalkan kinerja PPA dan PBB		cukup efektif	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jaringan irigasi yang ada	Kabid, Kasi	Selama Masa Pelaksanaan Kontrak
3	Peningkatan / rehabilitasi jaringan irigasi (DAK)	7 Pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan masa tanam petani	Pengaturan jadwal disesuaikan dengan masa tanam petani	Penyampaian informasi melalui juru dilokasi pekerjaan mengenai masa tanam petani	cukup efektif	Pengaturan jadwal disesuaikan dengan masa tanam petani	Kabid, Kasi	Selama Masa Pelaksanaan Kontrak
		8 Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada musim hujan	Pengaturan jadwal sesuai dengan informasi dari BMKG		kurang efektif	Pengaturan jadwal sesuai dengan informasi dari BMKG	Kabid, Kasi	Selama Masa Pelaksanaan Kontrak

No	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang Harus ada	Pengendalian yang sudah ada	Efektivitas Pengendalian yang ada	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		9	Kurangnya alokasi anggaran untuk melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi	Kegiatan dilaksanakan berdasarkan Prioritas	cukup efektif		Kabid, Kasi	1 Thn	
4	Pembaharuan Database Irigasi	10	Pelaksanaan kegiatan irigasi tidak tepat sasaran dan kurang efisien	Menyusun database irigasi yang lengkap dan akurat	Menyusun database secara swakelola	kurang efektif	Menyusun database menggunakan SDM yang lebih profesional	Kabid, Kasi	1 thn
5	WISMP	11	Kondisi jaringan irigasi tidak terjaga dengan baik	Meningkatkan partisipasi petani dalam permasalahan irigasi	Mengikutsertakan petani dalam kegiatan irigasi	cukup efektif	Meningkatkan keterlibatan petani melalui P3A, GP3A dan Komisi Irigasi	Kabid, Kasi	1 thn
6	Tersedianya Bantaran dan Tanggul sungai dengan kondisi baik	12	Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada musim hujan	Pengaturan Jadwal sesuai dengan informasi dari BMKG		Kurang efektif	Pengaturan Jadwal sesuai dengan informasi dari BMKG	Kabid, Kasi	Selama Masa Pelaksanaan Kontrak
		13	Kurangnya Alokasi Anggaran	Kegiatan dilaksanakan berdasarkan skala Prioritas	cukup efektif		Pemda	1 Thn	
		14	Tingkat Profesionalisme Penyedia Jasa belum sesuai ekspektasi	Pemilihan renanan yang berintegritas tinggi	Proses pemilihan penyedia jasa	Kurang efektif	Proses Kualifikasi yang Ketat	Pemda	Selama Masa Pelaksanaan Kontrak
7	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	15	Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada musim hujan sehingga akan berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan	Pengaturan Jadwal sesuai dengan informasi dari BMKG		Kurang efektif	Pengaturan Jadwal sesuai dengan informasi dari BMKG	Kabid, Kasi	Selama Masa Pelaksanaan Kontrak
		16	Kurangnya alokasi anggaran	Kegiatan dilaksanakan berdasarkan skala Prioritas	cukup efektif		Pemda	1 Thn	
		17	Tingkat Profesionalisme Penyedia Jasa belum sesuai ekspektasi	Pemilihan renanan yang berintegritas tinggi	Proses pemilihan penyedia jasa	Kurang efektif	Proses Kualifikasi yang ketat	Pemda	3 bln
8	Pengendalian banjir dari genangan air suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara	18	Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada musim hujan sehingga akan mengakibatkan terganggunya pekerjaan	Pengaturan jadwal sesuai dengan informasi dari BMKG		kurang efektif	Pengaturan jadwal sesuai dengan informasi dari BMKG	Kabid, Kasi	awal sampai dengan akhir tahun

No	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko		Pengendalian yang Harus ada	Pengendalian yang sudah ada	Efektivitas Pengendalian yang ada	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2		3	4	5	6	7	8	9
		19	Air yang masuk ke drainase melebihi Kapasitas karena terjadi penyempitan dimensi drainase dan tersumbatnya aliran air	Perbaikan dan Normalisasi Saluran		kurang efektif	Perbaikan dan Normalisasi Saluran	Kabid, Kasi	Maret sampai dengan akhir tahun
		20	Kurangnya alokasi anggaran yang mengakibatkan tidak tercapai aliran air ke daerah pembuangan , sehingga fungsi drainase kurang optimal	Kegiatan dilaksanakan berdasarkan Prioritas		cukup efektif	Kegiatan dilaksanakan berdasarkan Prioritas	Kabid, Kasi	Januari s/d Desember
9	Pengeringan dari genangan air suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal	21	Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada musim hujan sehingga akan mengakibatkan terganggunya pekerjaan	Pengaturan jadwal sesuai dengan informasi dari BMKG		kurang efektif	Pengaturan jadwal sesuai dengan informasi dari BMKG	Kabid, Kasi	awal sampai dengan akhir tahun
		22	Tidak tersedianya Prasarana Pengaturan tata air rawa	Pembuatan Database dan Bangunan Pendukung			Pembuatan Database dan Bangunan Pendukung	Kabid, Kasi	Maret sampai dengan akhir tahun
		23	Tidak terdistribusinya aliran air rawa kedaerah sungai dan pantai						
10	Tersedianya Dokumen Perencanaan Saluran Drainase / Gorong - Gorong	24	Tersedianya Dokumen Perencanaan Saluran Drainase / Gorong - Gorong	Membuat Kontrak Kerja	Membuat Kontrak Kerja	sangat efektif		Kepala Bidang, Kasi,	Selama Masa Pelaksanaan Kontrak
11	Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap Tersedianya dokumen perencanaan	25	Tersedianya dokumen perencanaan normalisasi saluran sungai	Membuat Kontrak Kerja	Membuat Kontrak Kerja	sangat efektif		Kepala Bidang, Kasi	Selama Masa Pelaksanaan Kontrak
12	Terlaksananya kegiatan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi	26	Tersedianya dokumen perencanaan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Membuat Kontrak Kerja	Membuat Kontrak Kerja	sangat efektif		Kepala Bidang, Kasi	Selama Masa Pelaksanaan Kontrak
13	Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan yang ada pada Dinas	27	Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan yang ada pada Dinas	menyiapkan SOP	Pengawasan langsung ke lapangan	cukup efektif		Kepala Dinas,Kepala Bidang, Kasi	1 Thn
14	Terlaksananya pengawasan dan konservasi terhadap pemanfaatan sumber daya air dan lingkungannya	28	Terlaksananya pengawasan dan konservasi terhadap pemanfaatan sumber daya air dan lingkungannya	menyiapkan SOP	Pengawasan langsung ke lapangan	cukup efektif	Membuat produk hukum berupa Peraturan Bupati	Kepala Dinas,Kepala Bidang, Kasi	1 Thn
15	Tersedianya laporan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan	29	Tersedianya laporan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Membuat Kontrak Kerja	Membuat Kontrak Kerja	sangat efektif		Kepala Bidang, Kasi	Selama Masa Pelaksanaan Kontrak

No	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang Harus ada	Pengendalian yang sudah ada	Efektivitas Pengendalian yang ada	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Tersedianya dokumen perencanaan pengamanan muara dan pantai	30 Tersedianya dokumen perencanaan pengamanan muara dan pantai	Membuat Kontrak Kerja	Membuat Kontrak Kerja	sangat efektif		Kepala Bidang, Kasi	Selama Masa Pelaksanaan Kontrak

Ket:

- 1 Kolom 1 Diisi dengan nomor urut
- 2 Kolom 2 Diisi uraian risiko yang diidentifikasi
- 3 Kolom 3 Diisi dengan Pengendalian yang harus ada atas Risiko
- 4 Kolom 4 Diisi Pengendalian yang sudah ada
- 5 Kolom 5 Diisi Efektivitas Pengendalian yang ada
- 6 Kolom 6 Diisi Pengendalian yang masih dibutuhkan
- 7 Kolom 7 Diisi dengan nama Penanggungjawab untuk pengendalian
- 8 Kolom 8 Diisi dengan rencana waktu pelaksanaan perbaikan pengendalian



INFORMASI DAN KOMUNIKASI

SKPD : DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KAB. PESISIR SELATAN

No	Tujuan yang Diidentifikasi	Pengendalian Yg Direncanakan	Bentuk/ Sarana Komunikasi	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7
1	Merehabilitasi dan memelihara jaringan irigasi yang direncanakan	Pengaturan jadwal disesuaikan dengan masa tanam petani	Laporan, surat	Kabid	PPTK dan Rekanan	Bulanan
		Pengaturan jadwal sesuai dengan informasi dari BMKG	Surat	Kabid	BMKG	Tahunan
		Kegiatan dilaksanakan berdasarkan Prioritas	Surat, rapat	Kabid	PPTK	Tahunan
2	Optimalnya fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jaringan irigasi yang ada	Surat	Kabid	PPTK, Masyarakat	Bulanan
		Berkoordinasi dengan dinas Lingkungan hidup dan dinas kehutanan tentang lokasi yang terganggu	Surat	Kabid	Instansi Terkait	Tahunan
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jaringan irigasi yang ada	Laporan, rapat	Kabid	PPTK, Masyarakat	Tahunan
3	Meningkatkan / merehabilitasi jaringan Irigasi (DAK)	Pengaturan jadwal disesuaikan dengan masa tanam petani	Laporan, surat	Kabid	PPTK dan Rekanan	Bulanan
		Pengaturan jadwal sesuai dengan informasi dari BMKG	Surat	Kabid	BMKG	Tahunan
		Kegiatan dilaksanakan berdasarkan Prioritas	Surat, rapat	Kabid	PPTK	Tahunan
4	Tersedianya database irigasi yang lengkap dan akurat	Menyusun database menggunakan SDM yang lebih profesional	Laporan	Kabid	Konsultan	Tahunan
5	Meningkatnya partisipasi petani terhadap masalah irigasi	Meningkatkan keterlibatan petani melalui P3A, GP3A dan Komisi Irigasi	Surat, rapat	Kabid	P3A, GP3A, Komisi Irigasi	Bulanan
6	Tersedianya bantaran Sungai dan tanggul dengan kondisi baik	Pengaturan Jadwal sesuai dengan KKG	Laporan Kegiatan, Media Cetak, Internet, Sosialisasi	BMKG	Kepala Bidang	Awal tahun

		Proses Kualifikasi yang Ketat	Dokumen Perusahaan	Kontraktor	Kepala Bidang	Pertegahan sampai dengan akhir athun
7	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	Pengaturan Jadwal sesuai dengaKG	Laporan Kegiatan, Mesia Cetak, Internet, Sosialisasi	BMKG	Kepala Bidang	Awal tahun
		Proses Kualifikasi yang Ketat	Dokumen Perusahaan	Kontraktor	Kepala Bidang	Pertegahan sampai dengan akhir athun
8	Pengendalian banjir dari genangan air suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal	Pengaturan jadwal sesuai dengan informasi dari BMKG	Laporan Kegiatan, Mesia Cetak, Internet, Sosialisasi	BMKG	Kepala Bidang	Awal tahun
		Perbaikan dan Normalisasi Saluran	Informasi dan Komunikasidgn masyarakat , Identifikasi	Masyarakat dan Dinas PSDA	Kepala Bidang	Awal tahun
		Kegiatan dilaksanakan berdasarkan Prioritas	Daftar Inventtaris Usulan Kegiatan	Dinas PSDA	Kepala Bidang	Awal tahun sampai dengan akhir Tahun
9	Pengeringan dari genangan air suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal	Pengaturan jadwal sesuai dengan informasi dari BMKG	Laporan Kegiatan, Mesia Cetak, Internet, Sosialisasi	BMKG	Kepala Bidang	Awal tahun
		Pembuatan Database dan Bangunan Pendukung	Laporan Kegiatan, Mesia Cetak, Internet, Sosialisasi	Masyarakat dan Dinas PSDA	Kepala Bidang	Awal tahun sampai dengan akhir Tahun
10	Tersedianya dokumen perencanaan saluran Drainase dan Gorong-gorong	Penyelesaian pekerjaan tepat waktu	Kontrak Kerja	Kepala Bintek	Konsulatan Perencana	Oktober 2017
11	Tersedianya dokumen perencanaan normalisasi saluran sungai	Penyelesaian pekerjaan tepat waktu	Kontrak Kerja	Kepala Bintek	Konsulatan Perencana	November - Desember 2017
12	Tersedianya dokumen perencanaan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Penyelesaian pekerjaan tepat waktu	Kontrak Kerja	Kepala Bintek	Konsulatan Perencana	Oktober 2017
13	Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan yang ada pada Dinas	Optimalisasi pelaksanaan kegiatan monotoring dan evaluasi	SOP	Kepala Bintek	Konsulatan Perencana	Januarii - Desember 2017

14	Terlaksananya pengawasan dan konservasi terhadap pemanfaatan sumber daya air dan lingkungannya	Optimalisasi pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi	Peraturan Bupati	Kepala Bintek	Konsulatan Perencana	Januarii - Desember 2017
15	Tersedianya laporan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Penyelesaian pekerjaan tepat waktu	Kontrak Kerja	Kepala Bintek	Konsulatan Perencana	November 2017
16	Tersedianya dokumen perencanaan pengamanan muara dan pantai	Penyelesaian pekerjaan tepat waktu	Kontrak Kerja	Kepala Bintek	Konsulatan Perencana	Oktober 2017

Keterangan:

- 1 Kolom 3 : Diisi dengan Informasi Pengendalian yang ingin disampaikan
- 2 Rapat, lainnya
- 3 Kolom 5: Diisi dengan Kepala Satuan Kerja, Kabag/Kabid, Kelompok Pegawai (nama unit kerja), baik internal maupun eksternal
- 4 Kolom 6 : Diisi dengan saat tertentu, periodik mingguan/bulanan/tahunan



1	Merehabilitasi dan memelihara jaringan irigasi yang direncanakan	Pengaturan jadwal disesuaikan dengan masa tanam petani	Laporan, surat
2	Optimalnya fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jaringan irigasi yang ada	Surat
3	Meningkatkan / merehabilitasi jaringan Irigasi (DAK)	Pengaturan jadwal disesuaikan dengan masa tanam petani	Laporan, surat
4	Tersedianya database irigasi yang lengkap dan akurat	Menyusun database menggunakan SDM yang lebih profesional	Laporan
5	Meningkatnya partisipasi petani terhadap masalah irigasi	Meningkatkan keterlibatan petani melalui P3A, GP3A dan Komisi Irigasi	Surat, rapat
6	Tersedianya bantaran Sungai dan tanggul dengan kondisi baik	Pengaturan Jadwal sesuai dengan KG	Laporan Kegiatan, Media Cetak, Internet, Sosialisasi
7	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	Pengaturan Jadwal sesuai dengan KG	Laporan Kegiatan, Media Cetak, Internet, Sosialisasi
8	Pengendalian banjir dari genangan air suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal	Pengaturan jadwal sesuai dengan informasi dari BMKG	Laporan Kegiatan, Media Cetak, Internet, Sosialisasi
9	Pengeringan dari genangan air suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal	Pengaturan jadwal sesuai dengan informasi dari BMKG	Laporan Kegiatan, Media Cetak, Internet, Sosialisasi
10	Tersedianya dokumen perencanaan saluran Drainase dan Gorong-gorong	Penyelesaian pekerjaan tepat waktu	Kontrak Kerja
11	Tersedianya dokumen perencanaan normalisasi saluran sungai	Penyelesaian pekerjaan tepat waktu	Kontrak Kerja
12	Tersedianya dokumen perencanaan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Penyelesaian pekerjaan tepat waktu	Kontrak Kerja
13	Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan yang ada pada Dinas	Optimalisasi pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi	SOP
14	Terlaksananya pengawasan dan konservasi terhadap pemanfaatan sumber daya air dan lingkungannya	Optimalisasi pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi	Peraturan Bupati
15	Tersedianya laporan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Penyelesaian pekerjaan tepat waktu	Kontrak Kerja
16	Tersedianya dokumen perencanaan pengamanan muara dan pantai	Penyelesaian pekerjaan tepat waktu	Kontrak Kerja

DAFTAR RANCANGAN PEMANTAUAN

SKPD : DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KAB. PESISIR SELATAN

No	Tujuan yang Diidentifikasi	Uraian Pengendalian	Metode Pemantauan yang ada	Pemantauan yang akan digunakan			Tindakan Korektif Yang Diperlukan
				Metode Pemantauan	Dilakukan Oleh	Waktu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tersedianya jaringan irigasi dengan kondisi baik dan memadai	Pengaturan jadwal disesuaikan dengan masa tanam petani	Sudah	Berkelanjutan	Atasan Langsung	Triwulan IV	
		Pengaturan jadwal sesuai dengan informasi dari BMKG	Belum	Berkelanjutan	Atasan Langsung	Triwulan IV	
		Kegiatan dilaksanakan berdasarkan Prioritas	Sudah	Berkelanjutan	Atasan Langsung	Triwulan IV	Efisiensi anggaran
2	Mengoptimalkan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jaringan irigasi yang ada	Sudah	Berkelanjutan	Atasan Langsung	Triwulan IV	Pelaksanaan Pemeliharaan mengikutsertakan partisipasi masyarakat
		Berkoordinasi dengan dinas Lingkungan hidup dan dinas kehutanan tentang lokasi yang terganggu	Sudah	Evaluasi Terpisah	Atasan Langsung	Triwulan IV	Penanaman pohon terhadap lokasi yang terganggu
3	Meningkatkan / merehabilitasi jaringan Irigasi (DAK)	Pengaturan jadwal disesuaikan dengan masa tanam petani	Sudah	Berkelanjutan	Atasan Langsung	Triwulan IV	
1		Pengaturan jadwal sesuai dengan informasi dari BMKG	Belum	Berkelanjutan	Atasan Langsung	Triwulan IV	
		Kegiatan dilaksanakan berdasarkan Prioritas	Sudah	Berkelanjutan	Atasan Langsung	Triwulan IV	Efisiensi anggaran
4	Tersedianya database irigasi yang lengkap dan akurat	Menyusun database menggunakan SDM yang lebih profesional	Belum	Berkelanjutan	Atasan Langsung	Triwulan IV	Penyusunan dengan konsultan
5	Meningkatnya partisipasi petani terhadap masalah irigasi	Meningkatkan keterlibatan petani melalui P3A, GP3A dan Komisi Irigasi	Sudah	Berkelanjutan	Atasan Langsung	Triwulan IV	
6	Tersedianya bantaran Sungai dan tanggul dengan kondisi baik	Pengaturan Jadwal sesuai dengan KG	Belum ada	Berkelanjutan	Kabid, Kasi	Awal sampai dengan akhir tahun	Evaluasi Monitoring
		Proses Kualifikasi yang Ketat	Sudah Ada	Berkelanjutan	Kabid, Kasi	Awal sampai dengan akhir tahun	Evaluasi Monitoring
7	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	Pengaturan Jadwal sesuai dengan KG	Belum ada	Berkelanjutan	Kabid, Kasi	Awal sampai dengan akhir tahun	Evaluasi Monitoring

		Proses Kualifikasi yang Ketat	Sudah Ada	Berkelanjutan	Kabid, Kasi	Awal sampai dengan akhir tahun	Evaluasi Monitoring
8	Pengendalian banjir dari genangan air suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal						
9	Pengeringan dari genangan air suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal						
10	Tersedianya Dokumen Perencanaan Saluran Drainase / Gorong - Gorong	Penyelesaian pekerjaan tepat waktu	Sudah Ada	Berkelanjutan	Atasan langsung	Triwulan IV	Pemutusan Kontrak Kerja
11	Tersedianya dokumen perencanaan normalisasi saluran sungai	Penyelesaian pekerjaan tepat waktu	Sudah Ada	Berkelanjutan	Atasan langsung	Triwulan IV	Pemutusan Kontrak Kerja
12	Tersedianya dokumen perencanaan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Penyelesaian pekerjaan tepat waktu	Sudah Ada	Berkelanjutan	Atasan langsung	Triwulan IV	Pemutusan Kontrak Kerja
13	Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan yang ada pada Dinas	Optimalisasi pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi	Belum Ada	Berkelanjutan	Atasan langsung	Triwulan IV	Surat Teguran
14	Terlaksananya pengawasan dan konservasi terhadap pemanfaatan sumber daya air dan lingkungannya	Optimalisasi pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi	Belum Ada	Berkelanjutan	Atasan langsung	Triwulan IV	Surat Teguran
15	Tersedianya laporan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Penyelesaian pekerjaan tepat waktu	Sudah Ada	Berkelanjutan	Atasan langsung	Triwulan IV	Pemutusan Kontrak Kerja
16	Tersedianya dokumen perencanaan pengamanan muara dan pantai	Penyelesaian pekerjaan tepat waktu	Sudah Ada	Berkelanjutan	Atasan langsung	Triwulan IV	Pemutusan Kontrak Kerja

Keterangan :

1. Kolom 1 Diisi dengan nomor urut
2. Kolom 2 Diisi sesuai Pengendalian yang mengalami penyempurnaan
3. Kolom 3 Cukup jelas
6. Kolom 6 Cukup jelas

No	Tujuan	Pengendalian yang direncanakan	Bentuk/ Metode Pemantauan yang diperlukan	Penanggungjawab Pelaksanaan Pemantauan	Waktu Pelaksanaan Pemantauan
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya jaringan irigasi dengan kondisi baik dan memadai	Pengaturan jadwal disesuaikan dengan masa tanam petani	Berkelanjutan	Atasan Langsung	Triwulan IV
2	Mengoptimalkan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jaringan irigasi yang ada	Berkelanjutan	Atasan Langsung	Triwulan IV
3	Meningkatkan / merehabilitasi jaringan	Pengaturan jadwal disesuaikan dengan	Berkelanjutan	Atasan Langsung	Triwulan IV
4	Tersedianya database irigasi yang lengkap dan akurat	Menyusun database menggunakan SDM yang lebih profesional	Berkelanjutan	Atasan Langsung	Triwulan IV
5	Meningkatnya partisipasi petani terhadap masalah irigasi	Meningkatkan keterlibatan petani melalui P3A, GP3A dan Komisi Irigasi	Berkelanjutan	Atasan Langsung	Triwulan IV
6	Tersedianya bantaran Sungai dan tanggul dengan kondisi baik	Pengaturan Jadwal sesuai dengan BMKG	Berkelanjutan	Kabid, Kasi	Awal sampai dengan akhir tahun
7	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	Pengaturan Jadwal sesuai dengan KG	Berkelanjutan	Kabid, Kasi	Awal sampai dengan akhir tahun
8	Pengendalian banjir dari genangan air suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jaringan irigasi yang ada	Berkelanjutan	Kabid, Kasi	Awal sampai dengan akhir tahun
9	Pengeringan dari genangan air suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemeliharaan sarana irigasi yang ada	Berkelanjutan	Kabid, Kasi	Awal sampai dengan akhir tahun
10	Tersedianya Dokumen Perencanaan Saluran Drainase / Gorong - Gorong	Penyelesaian pekerjaan tepat waktu	Berkelanjutan	Atasan langsung	Triwulan IV
11	Tersedianya dokumen perencanaan normalisasi saluran sungai	Penyelesaian pekerjaan tepat waktu	Berkelanjutan	Atasan langsung	Triwulan IV
12	Tersedianya dokumen perencanaan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Penyelesaian pekerjaan tepat waktu	Berkelanjutan	Atasan langsung	Triwulan IV
13	Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan yang ada pada Dinas	Optimalisasi pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi	Berkelanjutan	Atasan langsung	Triwulan IV
14	Terlaksananya pengawasan dan konservasi terhadap pemanfaatan sumber daya air dan lingkungannya	Optimalisasi pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi	Berkelanjutan	Atasan langsung	Triwulan IV
15	Tersedianya laporan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Penyelesaian pekerjaan tepat waktu	Berkelanjutan	Atasan langsung	Triwulan IV
16	Tersedianya dokumen perencanaan pengamanan muara dan pantai	Penyelesaian pekerjaan tepat waktu	Berkelanjutan	Atasan langsung	Triwulan IV

